

ANALISIS FRAMING BERITA MAKAN BERGIZI GRATIS DI SULAWESI SELATAN PADA MEDIA ONLINE

^{1*}Rahmatul Hidayat, ²Sakral Wijaya Saputra

^{1,2}Universitas Pancasakti Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kota Makassar

Email : _attulahyadi86@gmail.com

Keyword: *Free Nutritious Meals, Framing Analysis, South Sulawesi, Online Media, Robert N. Entman.*

Abstract: *This study aims to analyze the framing of news about the Free Nutritious Meals (MBG) program in South Sulawesi in various online media throughout 2025. Using Robert N. Entman's model, this study describes how the media defines the problem, identifies causes, conducts moral evaluations, and recommends solutions. The results show a contrast between the government's optimistic narrative that focuses on administrative readiness and the critical narrative of independent media that emphasizes infrastructure constraints, budget limitations, and food quality incidents in the field. Local media tend to be more advocates in voicing public complaints, while national-regional media emphasize technocratic data. This study concludes that online media plays an active role in constructing the MBG reality as an arena of contestation between national ambitions and local realities.*

Kata Kunci: *Makan Bergizi Gratis, Analisis Framing, Sulawesi Selatan, Media Online, Robert N. Entman.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembingkaihan (*framing*) berita mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan pada berbagai media online sepanjang tahun 2025. Menggunakan model Robert N. Entman, penelitian ini menguraikan bagaimana media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, melakukan evaluasi moral, dan merekomendasikan solusi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontras antara narasi optimisme pemerintah yang berfokus pada kesiapan administratif dengan narasi kritis media independen yang menonjolkan kendala infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan insiden kualitas pangan di lapangan. Media lokal cenderung lebih advokatif dalam menyuarakan keluhan masyarakat, sementara media nasional-regional menekankan data teknokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media online berperan aktif dalam mengonstruksi realitas MBG sebagai arena kontestasi antara ambisi nasional dan realitas lokal.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan (*quick wins*) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah malnutrisi, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Secara nasional, target penerima manfaat program ini mencapai 82,9 juta orang.

Di Sulawesi Selatan, relevansi program ini sangat krusial mengingat angka prevalensi stunting di wilayah ini masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 27,2% pada pertengahan tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan angka stunting menjadi 23,3% pada tahun 2024 melalui berbagai intervensi, termasuk integrasi dengan program gizi nasional. Namun, implementasi di lapangan menghadapi tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah kepulauan hingga pegunungan yang sulit dijangkau. Media online di Sulawesi Selatan memiliki peran sentral dalam mengonstruksi realitas transisi kebijakan ini, di mana berita tidak lagi berdiri dalam ruang hampa melainkan berada dalam pertarungan kepentingan antara otoritas, pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Transformasi kebijakan gizi nasional yang diwujudkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi episentrum wacana publik di Indonesia, dengan Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah krusial dalam fase uji coba dan implementasi awal. Sebagai provinsi yang sering dianggap sebagai barometer pembangunan di Indonesia Timur, dinamika pemberitaan mengenai MBG di Sulawesi Selatan mencerminkan ketegangan antara ambisi politik pusat, kesiapan administratif daerah, dan realitas sosiologis di lapangan. Media online, dalam fungsinya sebagai pembentuk realitas sosial, tidak sekadar melaporkan pembagian paket makanan, melainkan mengonstruksi makna melalui pemilihan narasumber, penonjolan isu tertentu, serta penggunaan diksi yang mengarahkan persepsi khalayak. Laporan ini melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi berita MBG pada berbagai platform media online, menguraikan bagaimana narasi-narasi tersebut berinteraksi dengan kebijakan publik dan sentimen masyarakat di Sulawesi Selatan.

Konstruksi realitas dalam media online mengenai program MBG di Sulawesi Selatan dapat dipahami melalui lensa teori framing Robert N. Entman, yang mencakup empat elemen utama: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi. Melalui analisis terhadap media nasional yang memiliki kanal regional seperti DetikSulsel dan Kompas.com, media resmi pemerintah seperti portal Sulselprov.go.id, hingga media lokal seperti Fajar, Tribun Timur, dan Sindo Makassar, terlihat adanya pola pembingkai yang beragam. Sebagian besar media pemerintah cenderung menekankan optimisme institusional dan kesiapan aset daerah, sementara media independen mulai memberikan ruang bagi suara-suara kritis dari akademisi, lembaga

pengawas seperti Ombudsman, hingga keluhan langsung dari masyarakat terkait kualitas pangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui kanal informasinya secara konsisten membangun narasi "dukungan penuh" terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemingkajaan ini berfokus pada elemen kesiapan administratif dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur MBG. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dalam berbagai kesempatan yang dikutip media, menegaskan bahwa dari 24 kabupaten/kota di provinsi tersebut, sebanyak 20 daerah telah menetapkan titik lokasi untuk unit pelayanan gizi atau dapur MBG. Penonjolan aspek ini berfungsi untuk meyakinkan publik bahwa birokrasi daerah mampu menyelaraskan diri dengan kecepatan instruksi dari pemerintah pusat.

Penggunaan diksi seperti "langkah taktis" dan "komitmen strategis" sering muncul dalam rilis resmi pemerintah untuk menggambarkan proses penyiapan lahan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Media pemerintah juga sering mengaitkan kesuksesan program MBG dengan pencapaian fiskal daerah, seperti realisasi APBD Sulawesi Selatan yang masuk dalam 10 besar nasional pada tahun 2025. Hal ini menciptakan logika framing bahwa stabilitas ekonomi daerah adalah prasyarat utama sekaligus penjamin keberlanjutan program MBG di tingkat lokal. Namun, narasi ini sering kali bersifat top-down, di mana penekanan lebih diberikan pada formalitas administratif dibandingkan detail operasional yang sering menjadi kendala di tingkat sekolah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai karakteristik liputan media terkait program MBG di Sulawesi Selatan. Analisis Framing model Robert N. Entman yang fokus pada dua dimensi utama, yaitu seleksi isu (*selection*) dan penonjolan aspek (*salience*). Unit analisis berupa teks berita dari portal media online yang beroperasi di Sulawesi Selatan, termasuk media nasional-regional (DetikSulsel, Kompas.com) dan media lokal (Fajar.co.id, Tribun-Timur.com, Pijar News). Metode dokumentasi dan observasi sistematis melalui mesin pencari dengan kriteria berita yang memenuhi unsur 5W+1H dan memiliki relevansi langsung dengan uji coba MBG di Sulawesi Selatan. Peneliti membedah setiap teks berita ke dalam empat elemen framing (*Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgments, dan Treatment Recommendation*) untuk kemudian dibandingkan guna menemukan pola kecenderungan pemingkajaan media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Narasi Institusional dan Kesiapan Infrastruktur Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun narasi dukungan penuh terhadap program

prioritas nasional. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyatakan bahwa 20 dari 24 kabupaten/kota telah menetapkan titik lokasi dapur MBG menggunakan aset pemerintah provinsi. Media pemerintah membingkai kesiapan ini sebagai bukti kemampuan birokrasi daerah dalam menyelaraskan diri dengan instruksi pusat.

Kota Makassar menjadi panggung utama uji coba MBG di Sulawesi Selatan yang dimulai secara serentak pada 6 Januari 2025. Media online seperti DetikSulsel, Kompas.com, dan Antara memberikan liputan yang sangat ekstensif mengenai hari pertama pelaksanaan di sekolah-sekolah seperti SMPN 1 Makassar dan SDN Cendrawasih. Pembingkai berita di Makassar sangat didominasi oleh aspek partisipatif dan human interest. Diksi-diksi seperti "senang," "lahap," dan "terbantu" menjadi kata kunci yang digunakan untuk menggambarkan respons siswa terhadap paket makanan yang terdiri dari nasi, ayam, sayur, buah, dan susu.

Wali Kota Makassar, Munafri "Appi" Arifuddin, muncul sebagai narasumber dominan yang memberikan nilai tambah pada framing MBG melalui isu lingkungan. Appi secara cerdas menghubungkan program MBG dengan kampanye pengurangan sampah plastik di sekolah. Beliau mengusulkan agar pemerintah kota melalui program CSR menyediakan tumbler atau botol minum isi ulang bagi siswa untuk menggantikan botol plastik sekali pakai yang banyak ditemukan saat uji coba. Pembingkai ini menggeser fokus berita dari sekadar "makan gratis" menjadi "pembiasaan hidup sehat dan ramah lingkungan," yang memberikan citra positif bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana yang inovatif.

Meskipun narasi yang dibangun cenderung positif, media seperti Kompas.com juga menyisipkan rincian teknis mengenai tantangan anggaran. Terdapat catatan bahwa meskipun harga porsi ditetapkan Rp 10.000, simulasi awal di beberapa titik Makassar sebenarnya memerlukan biaya Rp 15.000 untuk memenuhi standar gizi lengkap secara ideal. Perbedaan persepsi mengenai anggaran ini mulai memicu pembingkai skeptis di beberapa kanal berita, yang mempertanyakan apakah pemangkasan anggaran akan berdampak pada kualitas bahan pangan di masa depan.

Implementasi MBG di Kabupaten Maros dan Gowa memberikan warna yang berbeda dalam pembingkai berita, terutama terkait tantangan geografis dan partisipasi pimpinan nasional. Di Maros, uji coba di SDN 103 Inpres Hasanuddin pada November 2024 dan Januari 2025 menjadi sorotan karena dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran tokoh nasional ini membuat media cenderung membingkai Maros sebagai "wilayah percontohan sukses" atau laboratorium kebijakan pusat di daerah.

Namun, media online di Maros juga mulai mengangkat isu disparitas antara sekolah di pusat kota dengan sekolah di wilayah pelosok atau pegunungan. Plh Kadis Pendidikan Maros, Patiroy, dalam wawancaranya mengakui bahwa sekolah di daerah Mandai lebih mudah dijangkau sebagai percontohan, sementara skema untuk sekolah di wilayah pelosok masih dalam tahap pengkajian mendalam. Framing "ketidakpastian bagi pelosok" ini menunjukkan

adanya kekhawatiran media bahwa program MBG mungkin hanya akan dinikmati secara optimal oleh siswa di wilayah urban yang memiliki akses transportasi memadai.

Di Kabupaten Gowa, media melaporkan dimulainya uji coba di 17 sekolah pada 13 Januari 2025, dengan fokus di Kecamatan Somba Opu. Pemerintah Kabupaten Gowa secara spesifik membingkai program ini sebagai peluang untuk memajukan UMKM lokal dengan memastikan seluruh bahan baku pangan diambil dari wilayah Gowa sendiri. Diksi "pemberdayaan ekonomi lokal" menjadi tema sentral dalam pemberitaan di Gowa, yang berfungsi sebagai pembenaran moral bahwa program MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi anak, tetapi juga suntikan ekonomi bagi petani dan pedagang di daerah tersebut.

Perbedaan harga per porsi antara simulasi yang dihadiri Wakil Presiden (Rp 15.000) dengan ketentuan nasional (Rp 10.000) menjadi poin kritis yang sering diabaikan dalam narasi pemerintah, namun mulai diulas secara mendalam oleh media yang memiliki orientasi analisis kebijakan publik. Hal ini mengarah pada pertanyaan mengenai standar kualitas yang seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Analisis Framing Risiko dan Akuntabilitas

Salah satu elemen penting dalam analisis framing berita MBG di media online adalah kehadiran suara-suara kritis dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Dr. Ihyani Malik, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, menjadi salah satu narasumber yang secara konsisten memberikan analisis skeptis namun konstruktif terhadap program ini.⁴ Pakar mendefinisikan masalah MBG bukan pada niat mulianya, melainkan pada "kesenjangan implementasi" antara instruksi pusat dan realitas infrastruktur di daerah pelosok Sulawesi Selatan.

Media online yang mengutip Ihyani Malik cenderung menonjolkan risiko kegagalan program akibat anggaran Rp 10.000 yang dianggap tidak realistis untuk standar gizi lengkap di daerah dengan indeks kemiskinan tinggi. Diksi "kunci sukses" digunakan untuk merujuk pada perlunya mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat, mengingat program ini menggunakan "uang negara" dalam jumlah masif. Pembingkaiannya menciptakan tuntutan moral agar pemerintah tidak hanya sekadar menjalankan instruksi pusat secara pasif, melainkan melakukan inovasi pengelolaan di tingkat lokal.

Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan juga memainkan peran kunci dalam membentuk frame "akuntabilitas pelayanan". Temuan Ombudsman setelah melakukan pengawasan di beberapa sekolah di Makassar pada 7-8 Januari 2025 mengungkap berbagai kendala lapangan, seperti keterlambatan distribusi makanan, wadah plastik yang kurang aman (berpotensi melukai siswa), hingga ketiadaan SOP baku untuk pengelolaan sampah sisa makanan. Media online menggunakan temuan Ombudsman ini untuk menyeimbangkan

euforia pemerintah dengan fakta-fakta teknis yang memerlukan perbaikan segera.

Kehadiran narasi pengawasan ini sangat penting karena mengubah persepsi publik dari "penerima bantuan" menjadi "konsumen layanan publik" yang berhak atas kualitas dan keamanan pangan. Media yang menonjolkan temuan Ombudsman secara implisit mengevaluasi bahwa kesuksesan MBG tidak bisa hanya diukur dari angka statistik distribusi, melainkan dari standar keamanan dan kepuasan penerima manfaat.

Puncak dari narasi kritis terhadap program MBG di Sulawesi Selatan tercermin dalam pemberitaan mengenai insiden di Kabupaten Bulukumba pada Mei 2025. Media online lokal dan nasional melaporkan adanya ratusan paket makanan yang berbau busuk dan tidak layak konsumsi di SMPN 2 Bulukumba. Pembingkai berita dalam kasus ini sangat kontras dengan euforia di Makassar; di sini, diksi yang dominan adalah "bau busuk," "mentah," "ditolak siswa," dan "dugaan korupsi".

Analisis framing terhadap berita di Bulukumba menunjukkan adanya pergeseran dari masalah teknis menjadi masalah moral dan hukum. Media mengangkat isu disparitas anggaran yang mencolok: anggaran resmi sebesar Rp 15.000 per paket diduga hanya terealisasi sebesar Rp 6.500 di lapangan. Hal ini menciptakan frame "pengkhianatan terhadap amanah publik," di mana program nasional untuk memperbaiki gizi anak sekolah justru dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum vendor atau pelaksana lokal.

Respon otoritas dalam pemberitaan juga dibingkai secara negatif. Ketika Badan Gizi Nasional (BGN) setempat memberikan pembelaan bahwa makanan tersebut tidak basi melainkan hanya "nasi basah" karena penggunaan beras tipe baru, media mengonfrontasinya dengan realitas di lapangan di mana siswa secara massal mengembalikan makanan tersebut. Konflik narasi ini menunjukkan adanya jurang kepercayaan antara penyelenggara program dengan masyarakat. Serikat Guru (FSGI) yang dikutip media bahkan menyerukan moratorium MBG di Sulawesi Selatan karena dianggap membahayakan kesehatan siswa.

Kejadian di Bulukumba berfungsi sebagai pengingat bagi pembaca media online bahwa tanpa pengawasan yang transparan, program dengan anggaran triliunan rupiah sangat rentan terhadap malpraktik. Framing berita dalam kasus ini berhasil memaksa otoritas daerah untuk memperketat pengawasan dan melibatkan tim kesehatan dalam setiap distribusi pangan.

Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geografis yang menantang, terdiri dari wilayah pegunungan yang terisolasi dan ratusan pulau kecil. Media online mulai membingkai isu MBG melalui lensa "keadilan geografis". Narasi yang berkembang adalah mengenai sulitnya menembus wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Sulawesi Selatan, di mana biaya logistik sering kali melampaui harga bahan pangan itu sendiri.

Dalam pemberitaan mengenai wilayah terpencil, media sering kali menonjolkan peran TNI

dan relawan sebagai pahlawan distribusi. Namun, di sisi lain, terdapat kritik mengenai keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan yang rusak dan ketersediaan air bersih untuk pengolahan makanan di dapur MBG. Framing ini mendefinisikan masalah sebagai "hambatan struktural" yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembagian nasi kotak, melainkan membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar secara paralel.

Pemerintah pusat melalui BGN merespons tantangan ini dengan konsep Satuan Pelayanan (SPPG) Terpencil yang memiliki radius layanan lebih pendek atau mekanisme pengiriman khusus. Namun, media online tetap skeptis terhadap kemampuan BGN dalam menjaga kualitas makanan yang harus menempuh perjalanan jauh melalui laut atau jalur darat yang ekstrem. Diksi "rantai pasok yang lemah" dan "risiko basi dalam perjalanan" menjadi perhatian utama dalam berita-berita yang fokus pada wilayah kepulauan seperti di Pangkep atau wilayah pegunungan di Luwu Utara.

Pembingkai mengenai geografi ini secara implisit menyampaikan pesan moral bahwa anak-anak di pelosok Sulawesi Selatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan gizi berkualitas, namun negara masih memiliki utang besar dalam hal infrastruktur pendukung yang memungkinkan hal itu terjadi secara berkelanjutan.

Narasi pemerintah yang paling kuat dalam membingkai MBG adalah janji mengenai dampak ekonomi berantai (*multiplier effect*). Media online di Sulawesi Selatan banyak mengutip pernyataan pejabat mengenai keterlibatan petani, peternak telur, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku. Framing ini mendefinisikan MBG sebagai "mesin pertumbuhan ekonomi baru" di tingkat pedesaan. Di daerah seperti Pinrang dan Gowa, bupati dan kadisdik secara spesifik menyebutkan bahwa program ini adalah cara untuk menghidupkan kembali pasar tradisional dan koperasi petani.

Namun, media online yang lebih jeli juga mengangkat sisi lain dari koin ekonomi ini: nasib UMKM kantin sekolah. Program makan gratis secara otomatis mengurangi daya beli siswa terhadap produk-produk di kantin sekolah yang selama ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Media online seperti Disway Sulsel dan portal pendidikan mulai membingkai isu ini sebagai "dilema kesejahteraan." Di satu sisi siswa mendapatkan nutrisi, di sisi lain pedagang kecil kehilangan mata pencaharian.

Pembingkai solusi yang ditawarkan media adalah melalui "integrasi ekonomi." Muncul saran-saran agar pedagang kantin tidak dimatikan, melainkan dilatih dan dilibatkan sebagai bagian dari rantai distribusi atau penyedia menu sampingan yang tetap memenuhi standar gizi. Diksi "pemberdayaan digital" dan "pelatihan manajemen usaha" bagi pengelola kantin mulai diperkenalkan dalam narasi berita untuk memberikan harapan bahwa program MBG tidak harus menjadi "pemangsa" bagi ekonomi mikro yang sudah ada.

Narasi ekonomi ini menunjukkan bahwa MBG adalah kebijakan yang memiliki dimensi

sosial yang luas. Media online berperan sebagai fasilitator diskusi antara kepentingan pemerintah dalam mencapai target gizi nasional dengan kepentingan rakyat kecil dalam mempertahankan kemandirian ekonomi mereka.

Analisis framing berita MBG di Sulawesi Selatan juga mengungkap adanya perbedaan gaya penulisan dan penekanan antara media nasional yang memiliki kanal daerah dengan media yang murni lokal. Media nasional seperti DetikSulsel dan Kompas.com cenderung menggunakan gaya jurnalisme data dan kutipan pejabat tinggi untuk membangun narasi yang sistematis dan terukur. Mereka sering menyertakan tabel atau infografis mengenai jumlah sekolah dan biaya per porsi, yang memberikan kesan objektif dan teknokratis.

Sebaliknya, media lokal seperti Fajar, Tribun Timur, dan Rakyat Sulsel lebih banyak memberikan ruang bagi "suara dari bawah." Mereka cenderung lebih berani dalam mengangkat isu-isu kontroversial seperti makanan berulat di Maros atau nasi basi di Bulukumba. Diksi yang digunakan media lokal sering kali lebih emosional dan deskriptif, bertujuan untuk memicu perhatian otoritas daerah. Pembingkai media lokal lebih bersifat advokatif, di mana mereka memosisikan diri sebagai pembela kepentingan warga lokal yang merasa dirugikan oleh teknis pelaksanaan program yang buruk.

Sementara itu, portal berita resmi pemerintah seperti Sulselprov.go.id mempertahankan gaya penulisan humas (public relations) yang sangat formal.³ Mereka hampir tidak pernah mengangkat kendala lapangan, melainkan fokus pada seremoni kunjungan pejabat, rapat koordinasi, dan klaim kesiapan aset. Pembingkai di media pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas opini publik dan memberikan citra bahwa program berjalan tanpa hambatan berarti di bawah kendali gubernur dan jajarannya.

Perbedaan pembingkai ini menciptakan ekosistem informasi yang kaya namun membingungkan bagi pembaca. Di satu sisi mereka melihat kesuksesan di layar media pemerintah, namun di sisi lain mereka mendapati krisis di media lokal. Hal ini menuntut kedewasaan pembaca dalam memilah informasi mengenai realitas MBG di Sulawesi Selatan.

Pemberitaan mengenai MBG di Sulawesi Selatan secara konsisten menunjukkan bahwa program ini masih berada dalam fase transisi yang krusial. Harapan besar dibebankan pada program ini untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Sulawesi Selatan (di atas 20 persen) dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa.¹¹ Namun, tantangan utama yang terus disuarakan oleh media online adalah keberlanjutan pasokan bahan baku lokal dan konsistensi kualitas pangan di tengah anggaran yang ketat.

Analisis framing berita juga memberikan rekomendasi implisit bagi penyelenggara program. Media melalui kutipan pakar dan lembaga pengawas mendorong adanya standarisasi menu yang lebih ketat, transparansi audit anggaran di tingkat vendor, hingga pelibatan masyarakat desa secara lebih mandiri dalam mengelola dapur MBG guna mengurangi beban logistik

distribusi.5 Diksi "desentralisasi pengelolaan" mulai muncul sebagai solusi jangka panjang agar program MBG tidak bersifat terlalu tersentralisasi yang rentan terhadap hambatan distribusi geografis.

Kedepan, media online diprediksi akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi penuh MBG yang dijadwalkan merata pada tahun 2025. Isu mengenai "keamanan gizi" akan tetap menjadi topik hangat, terutama jika terjadi kembali insiden keracunan atau penurunan kualitas pangan. Peran media sebagai jembatan antara aspirasi warga Sulawesi Selatan dengan kebijakan nasional tetap vital untuk memastikan bahwa "makan gratis" benar-benar berarti "makan bergizi" dan memberikan dampak nyata bagi generasi masa depan daerah tersebut.

KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap framing berita Makan Bergizi Gratis di media online Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa program ini adalah sebuah arena kontestasi makna yang luas. Media telah berhasil mengangkat program ini dari sekadar isu "pemberian makanan" menjadi isu kedaulatan ekonomi lokal, keadilan geografis, akuntabilitas pelayanan publik, dan integrasi lingkungan. Melalui pbingkaian yang beragam—dari optimisme institusional hingga skeptisisme kritis—media online di Sulawesi Selatan tidak hanya mendokumentasikan sejarah implementasi MBG, tetapi juga berperan aktif dalam mengoreksi jalannya kebijakan melalui ekspos terhadap berbagai kendala lapangan. Kesuksesan MBG di masa depan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mau mendengarkan "framing kenyataan" yang disajikan oleh media dan masyarakat guna melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2025, 6 Januari). Wali Kota Makassar pantau langsung program makan bergizi gratis. <https://www.antaraneews.com/berita/4566014/wali-kota-makassar-pantau-langsung-program-makan-bergizi-gratis> 16

DetikSulsel. (2025, 7 Januari). Serba-serbi uji coba perdana program makan bergizi gratis di Sulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7720642/serba-serbi-uji-coba-perdana-program-makan-bergizi-gratis-di-sulsel> 7

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Fajar.co.id. (2025, 24 Mei). Paket makan bergizi gratis di Bulukumba keluar bau busuk, siswa tolak konsumsi. <https://fajar.co.id/2025/05/24/paket-makan-bergizi-gratis-di-bulukumba-keluar-bau-busuk-siswa-tolak-konsumsi/> 10

Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21. 3

Jurnal Intelektual. (2025). Polemik program makan bergizi gratis (MBG) dan kesenjangan akses pada sekolah nonformal: Studi kasus PKBM dalam program paket A. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(4), 24–32.

Malik, I. (2025, 7 Januari). Masukan pakar kebijakan publik Unismuh terhadap program makan bergizi gratis. Unismuh Makassar News. <https://news.unismuh.ac.id/2025/01/07/masukan-pakar-kebijakan-publik-unismuh-terhadap-program-makan-bergizi-gratis/> 8

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. (2025, 9 Januari). Ini catatan temuan Ombudsman Sulsel pada program makan siang gratis di Makassar (Siaran Pers No. 002/MKS/I/2025). <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ini-catatan-temuan-ombudsman-sulsel-pada-program-makan-siang-gratis-di-makassar> 5

Pijar News. (2025, 17 Maret). 6.198 siswa terima MBG, Bupati Pinrang tinjau pelaksanaan di dua kecamatan. <https://www.pijarnews.com/6198-siswa-terima-mbg-bupati-pinrang-tinjau-pelaksanaan-di-dua-kecamatan/> 17

Pranandana, V. A. K., Haryanti, N., & Meifilina, A. (2025). Analisis framing pemberitaan program makan bergizi gratis (MBG) pada media online Kompas.com dan Kumparan.com. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://doi.org/10.62281/t7gs9540>

Sulselprov. (2025). Pemprov Sulsel siap dukung program makan bergizi gratis, realisasi APBD 2025 masuk 10 besar nasional. <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-siap-dukung-program-makan-bergizi-gratis-realisasi-apbd-2025-masuk-10-besar-nasional> 4

Sumardi, E., Iskandar, D., & Azizah, H. N. (2025). Perbandingan konstruksi berita makan bergizi gratis (MBG) di media online Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 144–156.

Karya yang dikutip

Menteri PPPA Tegaskan MBG Berbasis Perlindungan Anak - RRI.co.id - Berita, 2026, <https://berita.rri.co.id/nasional/2237108/menteri-pppa-tegaskan-mbg-berbasis-perlindungan-anak>

SK Nomor 77.2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program MBG Di Wilayah Terpencil - Scribd, 2026, <https://id.scribd.com/document/944240950/SK-Nomor-77-2-Tahun-2025-tentang-Pedoman-Teknis-Tata-Kelola-Program-MBG-di-Wilayah->

Terpencil

Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan - Research Gate, 2026, <https://www.researchgate.net/publication/388421764> Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur Tantangan Implementasi dan Solusi untuk Ketahanan Pangan

Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, 2026, <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-siap-dukung-program-makan-bergizi-gratis-realisisi-apbd-2025-masuk-10-besar-nasional>

Ini Catatan Temuan Ombudsman Sulsel pada Program Makan ..., 2026, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ini-catatan-temuan-ombudsman-sulsel-pada-program-makan-siang-gratis-di-makassar>

Makan Bergizi Gratis -, 2026, <https://blog.ralali.com/wp-content/uploads/2025/08/Standard-Operating-Procedure-Dapur-MBG.pdf>

Serba-serbi Uji Coba Perdana Program Makan Bergizi Gratis di Sulsel - detikcom, 2026, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7720642/serba-serbi-uji-coba-perdana-program-makan-bergizi-gratis-di-sulsel>

Harapan dan Tantangan Makan Bergizi Gratis - Disway Sulsel, 2026, <https://sulsel.disway.id/nasional/read/10211/harapan-dan-tantangan-makan-bergizi-gratis>

Masukan Pakar Kebijakan Publik Unismuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis, 2026, <https://news.unismuh.ac.id/2025/01/07/masukan-pakar-kebijakan-publik-unismuh-terhadap-program-makan-bergizi-gratis/>

INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA, 2026, <https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/intelektual/article/download/318/241>

Pemprov Gorontalo Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Lewat Seminar Nasional, 2026, <https://mbg.guetilang.com/pemprov-gorontalo-evaluasi-program-makan-bergizi-gratis-lewat-seminar-nasional>

Salak Program Makan Bergizi Gratis di Maros Berulat, Pengelola Minta Maaf - YouTube, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=LCpSX5FP4Ro>

Begini Isi Paket MBG Selama Ramadan di Pinrang - YouTube, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=KTjx6UUFb1A>

6.198 Siswa Terima MBG, Bupati Pinrang Tinjau Pelaksanaan di Dua Kecamatan, 2026, <https://www.pijarnews.com/6198-siswa-terima-mbg-bupati-pinrang-tinjau-pelaksanaan-di-dua-kecamatan/>

Program Makanan Bergizi Gratis Ramadan Dimulai di Pinrang - YouTube, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=3nUKGLQZH_c

Wali Kota Makassar pantau langsung program makan bergizi gratis - ANTARA News, 2026, <https://www.antaranews.com/berita/4566014/wali-kota-makassar-pantau-langsung-program-makan-bergizi-gratis>

Perbandingan Konstruksi Berita Makan Bergizi Gratis (MBG) di Media Online Indonesia, 2026, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRKom/article/view/32874>